

Judul : PDIP Setuju Perpanjang, PAN Menolak
Tanggal : Senin, 25 September 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

PDIP Setuju Perpanjang, PAN Menolak

Masa Kerja Pansus Angket KPK

JAKARTA-Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan sinyal jika partainya mendukung Pansus Hak Angket KPK di DPR RI untuk diperpanjang masa kerjanya. Dukungan itu menyusul, kinerja pansus yang belum maksimal dalam mengumpulkan kesimpulan akhir. "Sekiranya belum selesai dan diperlukan pendalaman lebih lanjut, ya tentu saja diberikan ruang bagi Pansus untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya," kata Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (24/9).

Kendati demikian, ia juga memberikan kewenangan pada fraksi untuk mendialogkan hal tersebut dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lain. Mengingat, semangat yang ia bawa hanya untuk memperbaiki kinerja institusi di negara ini. "Pansus (Hak Angket) KPK dilakukan untuk perbaikan kinerja KPK yang memiliki kewenangan yang sangat besar. Agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ada di dalamnya. Agar kewenangan yang sangat besar, betul-betul dipakai untuk memberantas korupsi," papar Hasto.

Ia menegaskan, PDIP memberikan mandat kepada fraksi untuk memberikan keputusan sekiranya fakta-fakta yang dikumpulkan sebagai hasil penyelidikan dalam berjalannya UU KPK sudah berjalan dengan baik, maka bisa direkomendasikan bagaimana kerja sama lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi sudah disusun rancangannya. "Bagaimana agar KPK juga dapat memperbaiki diri, karena seluruh komponen institusi negara dan parpol punya ke-

wajiban untuk terus menerus memperbaiki diri, setelah semuanya selesai, maka tentu saja tugas tersebut ada batas akhirnya," kata Hasto.

Sementara, anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Arsul Sani mengaku, ada kecenderungan dari sejumlah anggota DPR yang ingin melemahkan KPK di balik pembentukan pansus tersebut. "Di DPR ada 10 fraksi, 560 anggota, dan lain-lain, tak mungkin suaranya satu. Saya juga tak ingin bantah, mungkin saja di antara 560 itu punya agenda melemahkan KPK. Yang jadi salah, itu semua dianggap melemahkan," aku Arsul, kemarin.

Di internal Pansus KPK, kata Arsul, anggota pansus sudah membahas sejumlah rekomendasi yang dalam pemberantasan korupsi. Arsul secara tegas menyatakan, partainya tidak setuju jika Pansus meminta KPK hanya menjalankan fungsi pencegahan dalam memberantas korupsi. "Posisi PPP, kami tak akan setuju kalau ada rekomendasi Pansus yang inginkan KPK ke depan, lakukan fungsi pencegahan dalam korupsi. Bagaimana fungsi penyelidikan, penyidikan dan sebagainya," tegasnya.

Arsul menjelaskan, jika DPR ingin mengonfigurasi fungsi penegak hukum, sebaiknya harus ditata secara menyeluruh dan komprehensif. "Kita kembalikan ke sudut pandang lembaga hukum yang menyelidik dan menyidik, tidak menuntut dan sebaliknya," tutupnya.

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, pihaknya tidak akan memperpanjang masa kerja Pansus Angket KPK yang jatuh pada 28 September 2017 nanti. "Nggak (perpanjang). (Sudah) selesai," ungkapnya kepada wartawan, Minggu (24/9). (aen)